



**ANALISA POTENSI SEKTOR BASIS PERDAGANGAN
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Dijadikan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi*

Oleh:

NURLAILA
NPM : 1515100283

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NURLAILA
NPM : 1515100283
PROGRAM STUDI : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISA POTENSI SEKTOR BASIS
PERDAGANG DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LANGKAT.

MEDAN, NOVEMBER 2019

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN


(Junawan, S.E., M.Si)

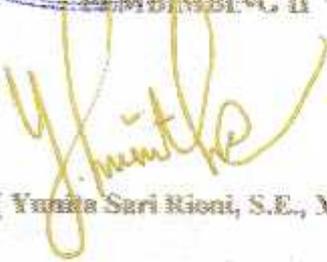


(Yulia Sari Rioni, S.E., M.Hum)

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si)


(Yulia Sari Rioni, S.E., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA	: NURLAILA
NPM	: 1513100283
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI
JENJANG	: SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI	: ANALISA POTENSI SEKTOR BASIS PERDAGANGAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

MEDAN, NOVEMBER 2019



ANGGOTA II

(Yusita Sari Rioni, S.E., M.Si)

ANGGOTA I

(Fitri Yuni Panggabean, S.E., M.Si)

ANGGOTA III

(Hernawaty, S.E., M.M)

ANGGOTA IV

(Fitri Bruna Sari, S.E., M.M)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURLAILA
NPM : 1515100283
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISA POTENSI SEKTOR BASIS
PERDAGANGAN DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2019



(NURLAILA)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURLAILA
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 05 April 1997
NPM : 1515100283
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jalan Rinjani

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019
Yang membuat pernyataan



(Nurlaila)

Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme 44...%

Medan 27 SEPTEMBER 2019

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 26 September 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURLAILA
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 05 April 1997
Nama Orang Tua : Sahudi
N. P. M : 1515100283
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 081370188168
Alamat : Jl. Rinjai Blok III

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Potensi Sektor Basis Perdagangan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLIA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintast pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiplakan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbd :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
(1k.T. 50%)	Rp	2.625.000
		<u>Rp. 4.725.000</u>

Ukuran Toga : L

Diketahui/Ditandatangani oleh :

Dr. Surya Asta, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Hormat saya
Nurlaila
NURLAILA
1515100283

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 30/09/2019
Ka. BPAA
Arif



TANDA BEBAS PUSTAKA
No. 804/Perp/Bp/2019
Dinyatakan tidak ada sangkut
pant dengan UPT. Perpustakaan
27 SEP 2019
UNPAS
INDONESIA
Baniyah Camiago

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

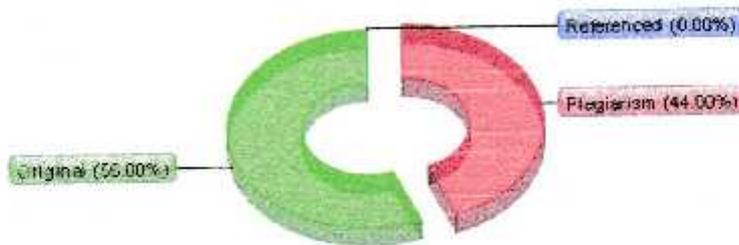
Analyzed document: 24/09/2019 16:54:17

"NURLAILA_1515100283_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

%	wrds	Source
37	3863	http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018/14.1.02.01.0111.pdf
31	3482	https://docplayer.info/48542113-Prosiding-peran-pemerintah-daerah-dalam-persaingan-global-...
19	2810	https://www.pelajaran.co.id/2018/19/pengertian-sumber-dan-faktor-yang-mempengaruhi-pendapa...

Show other Sources:]

Processed resources details:

251 - Ok / 31 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

Excluded Urls:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NURLAILA
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 05 April 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100283
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, JPK 3.35
 Nomor Hp : 081370188168
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	perdagangan	Judul
1.	Analisis sektor basis dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten langkat	

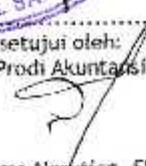
Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

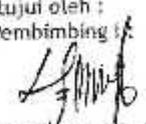
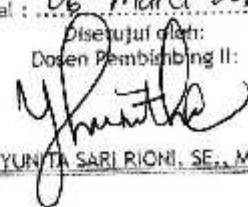
Tanda Tangan Yang Bertanda Tangan

 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)
 Rektor

Medan, 06 Maret 2019
 Permohon,
 (Nurlaila)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nida, H., M.Hum.)
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 06/03/2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I:

 (Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)
 Tanggal : 06 Maret 2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II:

 (YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, SE, M.Si.
 Dosen Pembimbing II : Sunita Sari Rizki, SE, M.Si.
 Nama Mahasiswa : NURLAILA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100283
 Bidang Pendidikan : Strata 1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisa Potensi Sektor Basis Perdagangan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1 ⁰⁹ - 2019	- Supriatna Lektor kelateng masalah dgn Rumus masalah pajak Pemakaian, metode pemukiman (Sampul data => pemukiman - Sampul beresipulor (0665)		

Medan, 20 September 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Saia Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Jari Panggabean, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Kiani, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : NURLAILA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100283
 Tingkat Pendidikan : Strata I
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi : Analisa Potensi Sektor Basis Perdagangan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
05/19	- Perbaiki Daftar Pustaka - Teori Marketing semua diadaptasi Pustaka - Spasi - Isi tidak boleh berwarna	YR	
09/19	- B. Inggris Miring - Teori semua dimunculkan diadaptasi Pustaka - Isi tidak boleh berwarna	YR	
05/19	ACC Selang mesa Hiseu	YR	

Medan, 09 September 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Mita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan
Email : fasosa@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Senin Tanggal, 04 Bulan, November Tahun, 2019, telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akuntansi Semester II Tahun Akademik 2019 bagi mahasiswa/i atas nama :

Nama : Nurlaila
Npm : 1515100282
Program Studi : Akuntansi
Tanggal Ujian : 04 November 2019
Judul Skripsi Lama : Analisis Sektor Basis Perdagangan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat
Judul Skripsi Baru : Analisa Potensi Sektor Basis Perdagangan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

NO	JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
1	Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	<u>Junawan, SE, M.Si</u>	
2	Anggota I/ Pembimbing I	<u>Fitri Yani Panggatean, SE, M.Si</u>	
3	Anggota II/ Pembimbing II	<u>Yanita Sari Rioni, SE, M.Si</u>	
4	Anggota III/ Penguji I	<u>Hermawaty, SE, M.M</u>	
5	Anggota IV/ Penguji II	<u>Pipit Buana Sari, SE, M.M</u>	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis potensi sektor basis perdagangan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT dan sumber data sekunder dengan pengumpulan data tentang potensi daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Potensi sektor pertanian dan perikanan pada Kabupaten Langkat dapat dilakukan dengan meningkatkan hasil lahan pertanian dan perikanan sebagai potensi sektor unggulan perdagangan melalui strategi membuat arah kebijakan untuk dapat memperluas lahan pertanian, melakukan ekspansi hasil pertanian ke daerah diluar kabupaten Langkat, pengembangan kawasan budidaya perikanan, peningkatan budidaya perikanan, peningkatan sarana infrastruktur akses produksi. Saran bagi Kabupaten Langkat adalah membuat terobosan bibit padi unggul dan jenis ikan unggulan yang minim di daerah lain.

Kata Kunci: Potensi, Sektor Basis, Sektor Pertanian dan Perikanan

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of the potential of the trade base sector in increasing the original income of the Langkat Regency. This research is a descriptive-qualitative study using SWOT analysis and secondary data sources by collecting data about regional potentials. This study used descriptive qualitative method. The potential of the agriculture and fisheries sector in Langkat Regency can be done by increasing the yield of agricultural and fishery land as a potential leading sector of trade through the strategy of making policy directions to be able to expand agricultural land, expand agricultural products to areas outside Langkat district, develop fisheries cultivation areas, increase cultivation fisheries, improvement of infrastructure for production access. The suggestion for Langkat Regency is to make a breakthrough in superior rice seedlings and minimal superior fish species in other areas.

Keywords: Potential, Base Sector, The Agriculture and Fisheries Sector

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat mengajukan skripsi ini. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: “Analisa Potensi Sektor Basis Perdagangan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk ini, bantuan dan bimbingan dari semua pihak sangat saya harapkan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Fitry Yani Pangabean S.E., M.Si selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan pengetahuan dan saran ataumasukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Yunita Sari Rioni S.E., M.Si selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah membimbing, memberi pengetahuan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa untuk orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda, Keluarga Besar saya, Serta kakak dan abang yang telah memberikan dorongan motivasi, curahan kasih sayang dan bantuan baik moril maupun material, dan doa yang selalu mengiringi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Dinda Linda Br Tarigan, Holnaida Br Manurung S.E, Martea Amelita Br Sitepu, dan Rina Nurhaliza yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis. Terimakasih untuk persahabatan yang indah selama ini.
8. Teman-teman Program Studi Akuntansi serta semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dalam penyusunan skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan para pembaca sekalian, dan mudah-mudahan penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat pada waktunya.

Medan, November 2019

Penulis

NURLAILA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	8
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	8
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	8
b. Produk Domestik Regional Bruto	8
2. Sektor Basis.....	10
a. Teori Ekonomi Basis.....	10
b. Pengertian Sektor Basis.....	11
c. Perbedaan Sektor Basis dan Sektor Non Basis	12
d. Metode Penentu Sektor Basis dan Sektor Non Basis.....	13
3. Pengertian Perdagangan	14
4. Sektor Pertanian dan Perikanan	17
a. Pengertian sektor pertanian	17
b. Pengelolaan pertanian.....	18
c. Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi.....	18
d. Sektor Perikanan	19
e. Pengelolaan Sektor Perikanan.....	20
5. Pendapatan Asli Daerah	20
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	20
b. Dasar Hukum dan Kelompok PAD.....	22
c. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah	23
d. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	24

6.	Analisis SWOT	32
a.	Pengertian Analisis SWOT	32
b.	Formulasi Analisis SWOT	33
c.	Strategi Dalam Analisis SWOT	34
B.	Penelitian Terdahulu	35
C.	Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Pendekatan Penelitian	39
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	39
C.	Jenis dan Sumber Data	40
D.	Teknik Pengumpulan Data	40
E.	Definisi Operasional Variabel.....	40
F.	Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	44
B.	Pembahasan.....	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
C.	Kesimpulan	64
D.	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pertumbuhan Berdasarkan Lapangan Usaha 3
Tabel 2.1	Mapping Penelitian Sebelumnya 35
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian Tahun Ajar 2018/2019 49
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel 41
Tabel 4.1	Kecamatan Pada Kabupaten Langkat 47
Tabel 4.2	Analisis SWOT Sektor Pertanian 56
Tabel 4.3	Analisis SWOT Sektor Perikanan 58
Tabel 4.4	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Pada Tahun 2015-2017..... 59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Analisis SWOT	33
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Langkat	44
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat	48
Gambar 4.3 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dapat mengelola sumber daya yang ada, dalam bentuk pola kemitraan diantara pemerintah daerah, masyarakat dengan sektor swasta, untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada serta menjaga stabilitas ekonomi secara berkesinambungan dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di daerah, dan pembangunan daerah tersebut telah direalisasikan melalui desentralisasi pembangunan melalui payung hukum Undang-Undang otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan adanya hak, kewenangan serta kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 otonomi Pemerintah Daerah memberikan juga hak dan kewenangan untuk menciptakan, memperluas dan mengelola sumber pendapatan bagi daerah tersebut asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sumber pendapatan bagi pemerintah daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Daerah ini dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain sumber Pendapatan Asli Daerah yang sah atau Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Halim dan Kusufi (2012:101).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dipacu melalui laju pertumbuhan ekonomi dengan melakukan perluasan dan pemanfaatan seluruh potensi daerah dan membangun sektor-sektor unggulan sebagai pembangunan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah sangat penting melakukan pemetaan terhadap faktor internal dan eksternal, baik dari sisi kelebihan dan kelemahan, peluang maupun ancaman, sehingga dapat teridentifikasi dengan baik faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai sumber unggulan secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Pendapatan Domestik Regional Bruto dibedakan menjadi dua, yakni: PDRB atas harga berlaku, untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi dan terjadinya pergeseran struktur ekonomi dan PDRB atas harga konstan, untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara nyata tanpa dipengaruhi faktor harga.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) menunjukkan bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun periode 2001-2012 rata-rata sebesar 25,9 persen dan didapat 3 (tiga) sektor basis yang memberikan kontribusi yaitu: sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor perdagangan dengan nilai $LQ > 1$ dan dengan menggunakan model regresi sederhana diperoleh bahwa sektor basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.

Kabupaten Langkat sebagai salah satu daerah Kabupaten otonom yang berada pada Provinsi Sumatera Utara yang jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonominya adalah dari sektor andalan yakni pertanian dan perikanan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Tahun	Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto		%
		Atas Harga Konstan	Atas Harga Berlaku	
2016	Pertanian dan perikanan	10.884.483	13.472.664,1	39,42
2017	Pertanian dan perikanan	11.437.571,9	14.595.137,1	39,68

Sumber: BPS Langkat, 2018

Pada tahun 2016 PDRB atas harga berlaku sebesar Rp 10.884.483 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 11.437.571,9, selanjutnya PDRB atas harga konstan pada tahun 2016 yakni Rp 13.472.664,1 dan mengalami peningkatan menjadi Rp 14.595.137,1 dengan persentase peningkatan pada tahun 2017 sebesar 39,68 dan tahun 2016 sebesar 39,42.

Berdasarkan PDRB lapangan usaha pertanian dan perikanan, baik PDRB atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan ternyata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat masih ditopang oleh sektor pertanian dan perikanan, oleh sebab itu Kabupaten Langkat memiliki potensi andalan yang sangat mendesak untuk dikelola menjadi sektor basis atau sektor unggulan yang berkelanjutan, karena sektor basis sangat penting bagi ketahanan perekonomian Kabupaten Langkat maka diperlukan suatu panduan dan strategi dalam membantu pengembangan dan pemetaan potensi pertanian dan perikanan di Kabupaten Langkat melalui analisis SWOT.

Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sektor basis dan Pendapatan Asli Daerah dengan judul: “Analisa Potensi Sektor Basis Perdagangan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat berdasarkan sektor andalan yakni pertanian dan perikanan.
- b. Pengembangan dan pemetaan sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan sehingga menjadi sektor unggulan bagi ketahanan ekonomi Kabupaten Langkat.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar peneliti tidak jauh dari masalah yang diinginkan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada strategi pengembangan sektor pertanian dan perikanan melalui analisis SWOT dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah strategi apa yang harus dilakukan untuk pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor basis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor basis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan wahana melatih, menulis dan berpikir secara ilmiah dengan menerapkan teori dan literatur yang ada, terutama pada bidang potensi sektor basis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

b. Bagi Kabupaten Langkat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat juga sebagai evaluasi pemerintahan Kabupaten Langkat dalam potensi sektor basis pertanian dan perikanan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Universitas Pancabudi Medan

Sebagai referensi bagi para akademis atau peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian di bidang permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andi Ayu Puji Lestari (2014) Universitas Jambi yang berjudul: “Peranan Sektor Basis Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun Periode 2001-2012”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisa Potensi Sektor Basis Perdagangan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian sebelumnya adalah sektor basis (X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sedangkan variabel penelitian ini adalah potensi sektor basis pertanian dan perikanan (X) dalam peningkatan pendapatan asli daerah (Y).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

3. Waktu Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2014 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.

4. Model Penelitian

Penelitian sebelumnya menggunakan dekuipif kualitatif dan regresi sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

Perbedaan variabel penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian dan model penelitian menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets (dalam Dharma, 2016:23) “Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya”. Selanjutnya menurut Sunusi (2014:46) Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* dalam jangka panjang serta menurut Sukirno (2014:20) Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemudian pendapat Tarigan (dalam Fauzini, 2013:21) Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah sebagai pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah (daerah) tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi adalah proses-proses pergeseran ekonomi suatu daerah kepada peningkatan maupun penurunan.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Sukirno (2013:34) “Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam

suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah”. Selanjutnya Boediono (dalam Hananto, 2018:15) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan “Pengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah atau daerah”. Berikutnya Arifin (dalam Siagian, 2018:18) mengatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah “Nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu wilayah (*region*), baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota”.

Pengukuran PDRB menurut Sukirno (dalam Hananto, 2018:15) menggunakan metode:

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

Atas dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun yang dinilai dengan harga di tahun yang bersangkutan. NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan Nilai Produksi Bruto (NPB/*output*) dengan biaya masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor. Menurut BPS perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dengan menghitung harga yang berlaku pada barang dan jasa pada setiap tahun.

- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan

Penghitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan penghitungan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan

dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Menurut BPS memperoleh PDRB atas dasar harga konstan dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen maka laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Penghitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral dan untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

2. Sektos Basis

a. Teori Ekonomi Basis

Menurut Arsyad (dalam Darman, 2016:8) pembangunan ekonomi daerah didefinisikan sebagai “Suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut”. Selanjutnya menurut Arsyad (dalam Adyatama, 2018:17) pembangunan ekonomi suatu daerah atau wilayah tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) di suatu daerah atau wilayah itu sendiri dimana pembangunan ekonomi akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi begitu juga sebaliknya

pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses terjadinya pembangunan ekonomi. Berikutnya menurut Arsyad (dalam Adyatama, 2018:17) potensi setiap daerah adalah sebagai penopang utama dalam pembangunan ekonomi sehingga terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan dengan melihat potensi ekonomi serta kondisi wilayah maka dapat menjadikan rumusan menentukan pola, kebijakan, dan strategi.

Pertumbuhan ekonomi tidak terjadi begitu saja perlu adanya kegiatan ekonomi dan dalam kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan ekonomi sektor non basis dan sektor basis.

b. Pengertian Sektor Basis

Menurut Arsyad (dalam Darman, 2016:8) ekonomi basis menyatakan bahwa “Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja”. Selanjutnya menurut Sjafrizal (dalam Adyatama, 2018:18) sektor basis adalah “Sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai Keuntungan Kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi”. Berikutnya menurut Richardson (dalam Pratama dan Soejoto, 2017:3) kegiatan basis adalah “Semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat eksogen (tidak tergantung pada kekuatan internal atau permintaan lokal”. Kemudian menurut

Glasson (dalam Sari, 2017:16) inti dari model ekonomi basis adalah “Arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sektor basis adalah sektor unggulan suatu wilayah yang kegiatannya mendatangkan uang dari luar wilayah tersebut.

c. Perbedaan Sektor Basis dan Sektor Non Basis

Menurut Glasson (dalam Darman, 2016:9) kegiatan sektor basis adalah “Kegiatan yang mengekspor barang atau jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau yang memasarkan barang atau jasa mereka kepada orang-orang di luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan sedangkan kegiatan sektor non basis adalah “Kegiatan yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang, jadi luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama adalah bersifat lokal”. Selanjutnya menurut Richardson (dalam Pratama dan Soejoto, 2017:3) kegiatan basis adalah “Semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah sedangkan kegiatan non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, oleh karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat”. Kemudian menurut Tarigan (dalam Sari, 2017:15) sektor basis adalah “Merupakan kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya pekerjaan lainnya, sedangkan menurut Nugraha (dalam

Sari, 2017:15) sektor non basis adalah “Sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian bersangkutan”.

d. Metode Penentu Sektor Basis dan Sektor Non Basis

Menurut Tarigan (2012:32) ada metode untuk menentukan sektor basis dan sektor non basis, metode tersebut adalah:

1) Metode langsung

Metode langsung dapat dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha ke mana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Dari jawaban yang mereka berikan, dapat ditentukan berapa persen produk yang dijual ke luar wilayah dan berapa persen yang dipasarkan di dalam wilayah. Untuk kepentingan analisis, perlu diketahui jumlah orang yang bekerja dan berapa nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut. Namun, menggunakan variabel nilai tambah/pendapatan sangat sulit karena di dalamnya terdapat unsur laba yang biasanya sensitif untuk ditanyakan.

2) Metode tidak langsung

Salah satu metode tidak langsung adalah dengan menggunakan asumsi atau biasa disebut metode asumsi. Ada kegiatan yang secara tradisional dikategorikan sebagai kegiatan basis, misalnya:

- (a) Kegiatan pertambangan karena umumnya hasilnya dibawa ke luar wilayah.

(b) Kegiatan pariwisata karena mendatangkan uang dari luar wilayah dalam metode asumsi.

(c) Kegiatan lain yang bukan dikategorikan basis adalah otomatis menjadi kegiatan non basis.

3) Metode campuran

Dalam metode campuran diadakan survei pendahuluan, yaitu pengumpulan data sekunder, biasanya dari instansi pemerintah atau lembaga pengumpul data seperti badan pusat statistik. Dari data sekunder berdasarkan analisis ditentukan kegiatan mana yang dianggap basis dan yang nonbasis. Asumsinya apabila 70% atau lebih produknya diperkirakan dijual ke luar wilayah maka kegiatan itu langsung dianggap basis. Sebaliknya, apabila 70% atau lebih produknya dipasarkan di tingkat lokal maka langsung dianggap non basis.

4) Metode *Location Quotient* (LQ)

Metode LQ membandingkan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah kita dibandingkan dengan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. $LQ > 1$ memberi indikasi bahwa sektor tersebut adalah basis, $LQ < 1$ berarti sektor itu adalah non basis.

3. Pengertian Perdagangan

Pengertian perdagangan menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012:4) adalah “Kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali (tanpa perubahan bentuk), barang-barang baru

maupun bekas” sementara itu pedagang adalah “Perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan atau perdagangan secara terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan”. Selanjutnya menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012:4) perdagangan dibagi atas dua jenis, yakni:

1) Perdagangan besar (*wholesaler*) adalah kegiatan perdagangan dari tangan produsen atau importir, pada umumnya dalam partai besar kepada pedagang eceran, perusahaan industri, rumah sakit, usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, maupun kepada pedagang besar lainnya. Perdagangan besar tidak menjual barang dagangan kepada konsumen rumah tangga. Pedagang besar adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas nama sendiri, dan atau nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan dan menjual barang dalam partai besar. Pedagang besar (*wholesaler*) terdiri dari:

- a) Distributor utama adalah perantara yang melakukan fungsi dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen.
- b) Perkulakan / grosir.
- c) Sub distributor.
- d) Pemasok besar/main supplier adalah perusahaan yang secara teratur melengkapi perusahaan lain dengan barang-barang, bahan baku, atau jasa-jasa. Usaha pemasok meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli dengan tujuan untuk menjualnya kembali atau digunakan dalam bisnis

mereka. Sumber barang berasal dari hasil produksi sendiri atau dari pabrik lain.

- e) *Dealer* besar.
 - f) Agen tunggal pemegang merek adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama pabrik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pabrik tersebut, termasuk agen pemegang lisensi.
 - g) Eksportir adalah perusahaan perdagangan yang melaksanakan kegiatan perdagangan ekspor.
 - h) Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku/perusahaan-perusahaan berbadan hukum, yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan Departemen Perdagangan yaitu harus memiliki API (Angka Pengenal Impor) atau APIS (Angka Pengenal Impor Sementara) atau APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas).
- 2) Perdagangan eceran (*ritel*) adalah kegiatan perdagangan yang umumnya melayani konsumen rumah tangga atau konsumen perorangan. Perdagangan eceran dibagi 2 jenis yaitu:
- a) Swalayan, terbagi dalam (1) supermarket merupakan unit kegiatan perdagangan eceran berskala besar, biasanya menjual makanan atau minuman, bahan makanan atau minuman dan tembakau dari berbagai merek yang bervariasi dengan harga yang sudah tetap atau *fixed price*, dan harga yang relatif murah bila dibandingkan dengan tempat

perdagangan biasa dan (2) *department store* atau toko serba ada merupakan usaha perdagangan yang berskala besar dan lengkap dengan aneka barang dagangan, seperti barang-barang yang khusus yang utamanya adalah bukan makanan atau minuman, perlengkapan pakaian, barang pecah belah, perlengkapan rumah tangga dan alat kantor.

- b) Bukan swalayan, misalnya toko atau kios adalah usaha perdagangan yang khusus memperdagangkan komoditi yang sejenis, yang terdiri dari komoditi makanan, minuman dan tembakau dari hasil industri pengolahan dan komoditi bukan makanan, minuman dan tembakau. Pedagang pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil.

4. Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan

a. Sektor Pertanian

Menurut Putong (2015:93) pertanian adalah “Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup”. Menurut Mosher (Putong, 2015:93) pertanian adalah “Suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan”. Menurut Van Aarsten (Putong, 2015:94) pertanian adalah “Digunakan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada

mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangkan tumbuhan dan hewan tersebut”.

b. Pengelolaan Pertanian

Menurut Mosher dalam Arsyad (2012:35) pembangunan sektor pertanian penting melakukan pemenuhan syarat pengelolaan pertanian yakni: teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, adanya perangsang produksi bagi tani, tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu, adanya pendidikan pembangunan, adanya kredit produksi, adanya kegiatan gotong royong petani, perbaikan dan perluasan tanah pertanian serta perencanaan nasional pembangunan pertanian.

c. Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tambunan (2013:23) dalam analisis klasik dari Kuznets pertanian di negara-negara sedang berkembang merupakan suatu sektor ekonomi yang sangat potensial, terdapat empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu sebagai berikut:

- 1) Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi non pertanian sangat tergantung pada produk-produk dari sektor pertanian, bukan saja untuk kelangsungan pertumbuhan suplai makanan tetapi juga untuk penyediaan bahan baku untuk keperluan kegiatan produksi di sektor-sektor non pertanian tersebut.
- 2) Kuatnya bisa agraris dari ekonomi selama tahap-tahap awal pembangunan, maka populasi di sektor pertanian daerah pedesaan membentuk suatu bagian yang sangat besar dari pasar permintaan domestik terhadap produk-produk

dari industri dan sektor-sektor lain di dalam negeri, baik untuk barang-barang produsen maupun barang-barang konsumen, kuznets menyebutnya kontribusi pasar.

- 3) Relatif pentingnya pertanian bisa dilihat dari sumbangan *out-put* nya terhadap pembentukan produk domestik bruto dan andilnya terhadap penyerapan tenaga kerja tanpa bisa dihindari menurun dengan pertumbuhan atau semakin tingginya tingkat pembangunan ekonomi.
- 4) Sektor pertanian mampu berperan sebagai salah satu sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran, baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau peningkatan produksi komoditi-komoditi pertanian menggantikan impor.

d. Sektor Perikanan

Menurut Arsyad (2012:40) dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 bahwa kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan atau yang disebut dengan agribisnis. Menurut Arsyad (2012:40) perikanan adalah “Kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Umumnya perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia”.

e. Pengelolaan Sektor Perikanan

Pengelolaan sektor perikanan menurut Tambunan (2013:23) adalah pemberdayaan seluruh proses dalam sektor perikanan yaitu:

1) Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan, alokasi sumberdaya ikan, serta penegakan hukum dari undang-undang dibidang perikanan.

2) Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal penangkapan ikan untuk memuat, mengangkut, menyimpan atau mengawetkannya.

3) Pembudidayaan Ikan

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah

dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber - sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh asli bersumber dari daerah sesuai dengan peraturan yang sah. Pendapatan Asli Daerah menurut Mardiasmo (2011:1) adalah “Penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Selanjutnya menurut Halim dan Kusufi (2012:101) Pendapatan Asli Daerah “Merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan Pendapatan Asli Daerah yaitu “Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan“. Pendapatan Asli Daerah menurut Badrudin (2012:99) merupakan “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”. Selanjutnya menurut Djaenuri (2012:88) Pendapatan Asli Daerah adalah “Sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan lebih rinci Mardiasmo (dalam Muhtarom, 2015:660) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Berdasarkan pengertian Pendapatan Asli Daerah diatas maka dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan pendapatan daerah yang sah bersumber dari daerah tersebut dipungut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

b. Dasar Hukum dan Kelompok Pendapatan Asli Daerah

Adapun dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:96) kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan atas empat kelompok, yakni:

- 1) Pajak Daerah.
- 2) Retribusi Daerah.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

- 4) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

c. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012:91) salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut.

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli

daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Selanjutnya menurut Halim dan Kusufi (2012:91) Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

d. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1) Pajak daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, dikatakan bahwa pajak daerah adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Pajak Daerah harus memiliki beberapa persyaratan antara lain:

- a) Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
- b) Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.
- c) Biaya administrasi harus rendah.

- d) Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis objek pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota dibedakan menjadi:

- a) Objek pajak daerah provinsi

Adapun beberapa objek pajak daerah provinsi sebagai berikut:

- (1) Pajak kendaraan bermotor

Adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- (2) Bea balik nama kendaraan bermotor

Adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

- (4) Pajak kendaraan di atas air

Adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor diatas air.

- (5) Pajak air di bawah tanah dan pajak air permukaan

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%.

- b) Jenis objek pajak untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak hotel

Adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

(2) Pajak restoran

Adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(3) Pajak hiburan

Adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

(4) Pajak reklame

Adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

(5) Pajak penerangan jalan

Adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

(6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

(7) Pajak parkir

Adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2) Retribusi Daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-undang 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan berbagai jenis pungutan itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Menurut Siahaan (2013:14) menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu atau khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Ada pun ciri-ciri retribusi daerah:

- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c) Adanya timbal balik secara langsung dapat ditunjuk.

- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau pun badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah dibedakan antara menjadi:

- a) Jenis retribusi daerah provinsi

Adapun beberapa jenis retribusi daerah provinsi sebagai berikut:

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- (4) Retribusi pengujian kapal perikanan.

- b) Jenis retribusi daerah kabupaten/kota

Adapun beberapa jenis retribusi daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP.
- (4) Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil.
- (5) Retribusi pelayanan pemakaman.
- (6) Retribusi pelayanan pengabuan mayat.
- (7) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (8) Retribusi pelayanan pasar.
- (9) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (10) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (11) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- (12) Retribusi pengujian kapal perikanan.

- (13) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (14) Retribusi jasa usaha pasar, grosir atau pertokoan.
- (15) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan.
- (16) Retribusi jasa usaha terminal.
- (17) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir.
- (18) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (19) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus.
- (20) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.
- (21) Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal.
- (22) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga.
- (23) Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air.
- (24) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair.
- (25) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.
- (26) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- (27) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (28) Retribusi izin gangguan.
- (29) Retribusi trayek.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 98) kekayaan daerah yang dipisahkan adalah “Kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan secara mandiri oleh daerah”. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan PAD lainnya

yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah dimana dalam bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititik beratkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962).

Menurut Darise (2011:136) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Berdasarkan hal ini maka perusahaan daerah merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang modalnya secara keseluruhan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bagi daerah yang mempunyai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar dan lain sebagainya merupakan bagian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Menurut Halim dan Kusufi (2012: 98) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan yang termasuk dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Hasil pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro.

- c) Pendapatan bunga.
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Menurut Mardiasmo (2012:132) rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Pendapatan Asli Daerah = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

6. Analisis SWOT

a. Pengertian Analisis SWOT

Menurut Siagian (2013:171) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threat*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, dan strategi, dan kebijakan organisasi. Dengan demikian perencanaan strategi (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada disaat ini.

Siagian (2013:172) mengatakan bahwa analisis SWOT adalah alat analisis manajemen yang ampuh apabila digunakan dengan tepat untuk merumuskan strategi-strategi tertentu. Fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan

informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman).

b. Formulasi Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2014:20) analisis SWOT adalah “indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Adapun formulasi analisis SWOT sebagai berikut:

IFAS EFAS	<i>Strengths (S)</i> Faktor Kekuatan Internal	<i>Weaknesses (W)</i> Faktor Kelemahan Internal
<i>Opportunities (O)</i> Faktor Peluang Eksternal	Strategi S-O Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<i>Threats (T)</i> Faktor Ancaman Eksternal	Strategi S-T Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

Gambar 2.1 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Pembagian faktor-faktor strategis dalam analisis SWOT yaitu:

1) Faktor berupa kekuatan

Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu daerah termasuk satuan-satuan bisnis didalamnya adalah antara lain kompetisi khusus yang terdapat dalam daerah yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh pemerintah daerah. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan-satuan yang bersangkutan.

2) Faktor kelemahan

Yang dimaksud dengan kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi pemerintah daerah

3) Faktor peluang

Definisi peluang secara sederhana peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi pemerintah daerah.

4) Faktor ancaman

Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu pemerintah daerah, jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi pemerintah daerah yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan.

c. Strategi Dalam Analisis SWOT

Selanjutnya strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi S-O Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- 2) Strategi S-T Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan dalam yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- 3) Strategi W-O Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada .
- 4) Strategi W-T Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Asal dan Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	M Anas Asyary (Universitas Jember) (2011)	Analisis Sektor Basis dan Pengembangan Wilayah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan	X= Sektor basis Pengembangan wilayah Y= Pertumbuhan Ekonomi	Deskriptif	Sektor pertanian merupakan sektor basis yang ada di kabupaten Lamongan dari tahun 2000-2009 dengan nilai rata rata LQ 2.6. Pengembangan sektor ini diharapkan akan dapat meningkatkan perolehan PDRB Kabupaten Lamongan sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya.

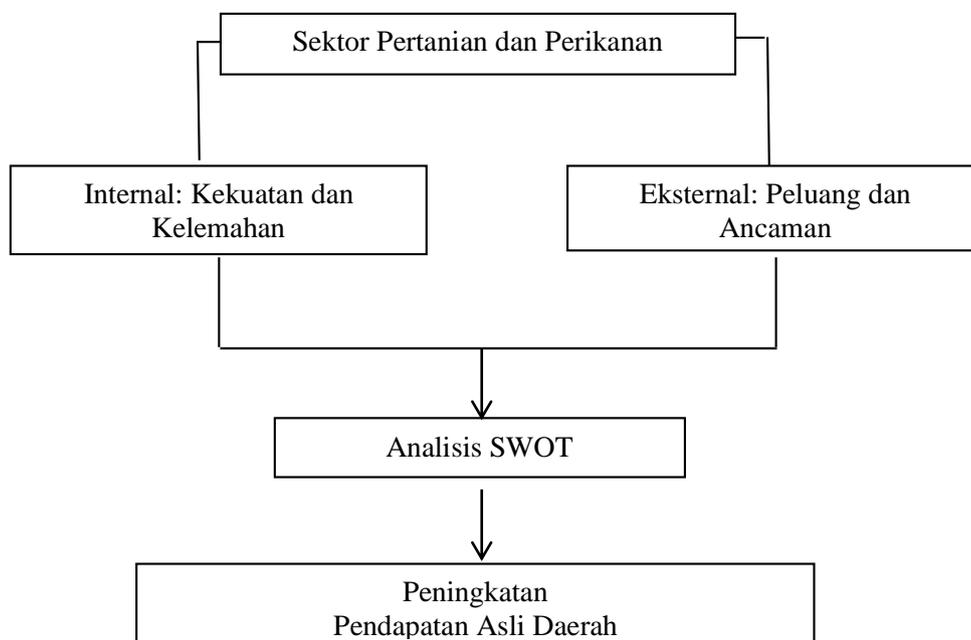
No	Nama/ Asal dan Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
2	Apriyani Intan Sari (Syarif Hidayatullah Jakarta) (2017)	Analisis Peranan Sektor Ekonomi Basis Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015	X=Peranan sektor ekonomi basis Y=Ketimpangan Pendapatan	<i>Location Quotient (LQ)</i> , Tipologi Klassen, Indeks Williamson, dan Korelasi Pearson <i>Product Moment</i>	Provinsi Jawa Tengah memiliki 4 sektor ekonomi basis, yakni sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan, yang dominan mengurangi ketimpangan dimiliki sektor pertanian (27,7%), sedangkan Tipologi Klassen menunjukkan hanya 6 kabupaten/kota yang maju, dan yang tertinggal 16 kabupaten/kota, Indeks Williamson dalam jangka waktu 5 tahun menurun sangat kecil (0,02), dari sebesar 0,69 tahun 2011 menjadi 0,67 tahun 2015, dan Korelasi <i>Pearson Product Moment</i> pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan berhubungan positif, dengan korelasi 25,1%.
3	Andi Ayu Puji Lestari (Universitas Jambi) (2014)	Peranan Sektor Basis Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun Periode 2001-2012	X=Sektor basis Y= Pendapatan Asli Daerah	Dekriptif kualitatif dan regresi	Perkembangan PAD Kabupaten Sarolangun periode 2001-2012 rata-rata sebesar 25,9 persen. Didapat 3 (tiga) sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor perdagangan dengan nilai LQ > 1. Dengan menggunakan model regresi sederhana diperoleh bahwa sektor basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Sarolangun.

No	Nama/ Asal dan Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
4	Darman (Universitas Haluoleo) (2016)	Analisis Sektor Unggulan Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Tenggara	X=Sektor Unggulan Y=Penyerapan Tenaga Kerja	Analisis Location Quatient	Hasil nilai LQ untuk tahun 2004 - 2013 yang di tinjau dari segi peranan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa terdapat 3 sektor ekonomi yang dapat diunggulkan ($LQ >$ yaitu Sektor Pertanian, Pengangkutan dan Jasa-Jasa dan dari hasil nilai LQ untuk tahun 2004 - 2013 yang ditinjau dari segi perbandingan porsi lapangan kerja per sektor maka penyerapan tenaga kerja yang lebih besar di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu disektor pertanian.
5	M Rozi Adyatama (Universitas Islam Indonesia) (2018)	Analisis Struktur Ekonomi dan Sektor Basis Di Kota Palu Tahun 2012-2016	X=Struktur ekonomi Y=Sektor basis	Location Quotient (LQ), Shift Share (SS) dan Typology Klassen	Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa ada empat belas sektor basis dan tiga sektor non basis. Analisis Shift Share menunjukkan bahwa kinerja sektor Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Jasa Pendidikan memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi daripada sektor lainnya. Analisis Typology Klassen, Kota Palu diklasifikasikan menjadi empat: daerah maju dan cepat tumbuh, daerah berkembang cepat tetapi tidak maju, daerah maju tetapi tertekan, dan daerah yang relatif tertinggal.

Sumber : Diolah Penulis,2019

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber pendapatan lain-lain yang sah mendorong pemerintah daerah untuk dapat melakukan strategi dalam peningkatan potensi daerahnya dan Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam sektor basis pertanian dan perikanan yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting. Kabupaten Langkat harus secara terus-menerus melakukan peningkatan pada sektor pertanian dan perikanan sehingga laju pertumbuhan ekonomi semakin baik yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang positif dan untuk mendapatkan pengelolaan potensi sektor pertanian dan perikanan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat maka dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:



Sumber : Diolah Penulis, 2019

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:29) metode deskriptif “Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan selesai. Untuk mengetahui lebih jelas lagi dapat dilihat pada uraian tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian Tahun Ajar 2018/2019

No	NAMA KEGIATAN	Tahun 2019			
		Januari	Feb-Mei	Jun- Okt	November
1	Pengajuan Judul				
2	Penyusunan Proposal				
3	Perbaikan / ACC Proposal				
4	Seminar Proposal				
5	Pengolahan data				
6	Penyusunan Skripsi				
7	Bimbingan Skripsi				
8	Sidang Meja Hijau				

Sumber : Rencana Penelitian 2019

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui :

1. Studi pustaka

Yaitu data dikumpulkan dari buku teori, karya ilmiah, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui www.bpslangkat.go.id, www.bps.go.id dan www.kemenkeu.go.id.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis terutama berupa dokumen, artikel, karya ilmiah dan buku-buku untuk mendapatkan data sekunder. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

E. Defenisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2015:31) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga variabel yang ditentukan dapat diukur dan definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak. Adapun defenisi operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	
Potensi sektor pertanian dan perikanan	Sektor pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Sektor perikanan adalah Kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. umumnya perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia Mosher (Putong, 2015);Arsyad (2012)	Kekuatan	Faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu daerah
		Kelemahan	Kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi pemerintah daerah
		Peluang	Situasi lingkungan yang menguntungkan bagi pemerintah daerah.
		Ancaman	Faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu pemerintah daerah
Pendapatan Asli Daerah	Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Halim dan Kusufi (2012:101).	Kontribusi sektor basis	Input sektor basis pada PAD

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2015: 335) adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 337) yaitu:

1. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi melalui pengumpulan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang tersedia.

3. Penyajian Data

Sajian data merupakan rangkaian informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang disusun secara logis dan sistematis yang mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian. Sajian data merupakan deskripsi mengenai kondisi rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman atas gambaran fenomena yang ada pada obyek penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang diperoleh sejak awal penelitian sebenarnya sudah merupakan suatu kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat sementara, kemudian meningkat sampai pada tahap kesimpulan yang mantap, yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat karena telah melalui proses analisa data. Pada tahap ini adalah mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dari proposisi. Penarikan

kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data dapat diuji validitasnya.

Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.263,29 km² atau 626.329 Ha, sekitar 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat terbagi dalam 3 wilayah pembangunan, yakni:

a. Langkat Hulu seluas 211.029 ha

Wilayah ini meliputi: Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai dan Binjai. Wilayah ini merupakan hulu sungai dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Langkat. Banyak jeram-jeram berarus deras, yang layak untuk dikembangkan sebagai sumber energi listrik Mikro Hidro. Dikawasan ini terdapat potensi tambang Batu Kapur dan Batubara. Selain itu terdapat potensi wisata berupa ekowisata Bukit Lawang yang berorientasi pada kegiatan konservasi Orang Utan dan ekosistemnya.

b. Langkat Hilir seluas 250.761 ha

Wilayah ini meliputi: Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura. Langkat Hilir sejak jaman Belanda dikenal sebagai wilayah perkebunan besar, yang sekarang dikenal dengan PTPN (PT Perkebunan Negara II dan IV). Sehingga budaya masyarakat perkebunan masih terlihat di wilayah ini. Sebagian wilayahnya juga merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL. Di Kecamatan Batang Serangan terdapat ekowisata Tangkahan, dengan atraksi menarik Unit Patroli Gajah. Para wisatawan dapat menikmati hiburan menaiki dan memandikan Gajah.

c. Teluk Aru seluas 164.539 ha

Wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lapan, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya. Wilayah ini merupakan daerah eksplorasi PT. Pertamina yang pertama di Indonesia, sehingga wilayah ini mempunyai karakteristik miniatur Indonesia, mengingat karyawan PT. Pertamina datang dari seluruh Indonesia. Namun potensi minyak dan gas bumi di Teluk Aru sudah semakin menipis dan kurang ekonomis untuk diusahakan, maka Kilang Pertamina di Pangkalan Brandan ditutup. Penutupan Kilang ini sangat terasa dampaknya bagi perekonomian masyarakat setempat. Sebagian wilayahnya juga merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL. Di Kecamatan Besitang juga terdapat Unit Patroli Gajah Aras Napal yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam.

2. Jumlah Kecamatan Pada Kabupaten Langkat

Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri atas 23 wilayah kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Batang Serangan (93,490 ha), dan yang paling sempit adalah Kecamatan Binjai (4,955 ha). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Tanjung Pura (19 desa/kelurahan) sedangkan kecamatan dengan desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Sawit Seberang, Brandan Barat dan Binjai (7 Desa/Kelurahan), rincian kecamatan, desa dan kelurahan adalah sebagai berikut:

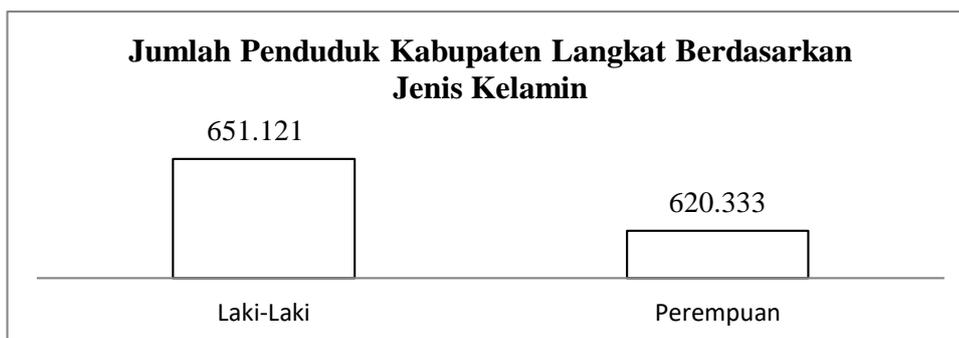
Tabel 4.1 Kecamatan Pada Kabupaten Langkat

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Banyaknya		Luas	
			Desa	Kelurahan	Km2	%
1	Bahorok	Pkn Bahorok	18	1	1.101,83	17,59
2	Sirapit	Sidorejo	10	0	98,5	1,57
3	Salapian	Minta Kasih	16	1	221,73	3,54
4	Kutambaru	Kutambaru	8	0	234,84	3,78
5	Sei Bingei	Namu Ukur Sltm	15	1	333,17	5,32
6	Kuala	Pkn Kuala	14	2	206,23	3,29
7	Selesai	Pkn Selesai	13	1	167,73	2,68
8	Binjai	Kwala Begumit	6	1	42,05	0,67
9	Stabat	Stabat Baru	6	6	108,85	1,74
10	Sei Wampu	Bingai	13	1	194,21	3,10
11	Batang Serangan	Batang Serangan	7	1	899,38	14,36
12	Sawit Seberang	Sawit Seberang	6	1	209,10	3,34
13	Padang Tualang	Tjg. Selamat	11	1	221,14	3,53
14	Hinai	Kebun Lada	12	1	105,26	1,68
15	Secanggang	Hinai Kiri	16	1	231,19	3,69
16	Tanjung Pura	Pkn. Tanjung Pura	18	1	179,61	2,87
17	Gebang	Pkn Gebang	10	1	178,49	2,85
18	Babalan	Pelawi Utara	4	4	76,41	1,22
19	Sei Lapan	Alur Dua	9	5	280,68	4,48
20	Brandan Barat	Tangkahan Durian	5	2	89,80	1,43
21	Besitang	Pkn Besitang	6	3	720,74	11,51
22	Pangkalan Susu	Bukit Jengkol	9	2	151,35	2,42
23	Pematang Jaya	Limau Mungkur	8	0	209,00	3,34
Jumlah			240	37	6.263,29	100

Sumber: bpslangkat.go.id, 2019

3. Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat

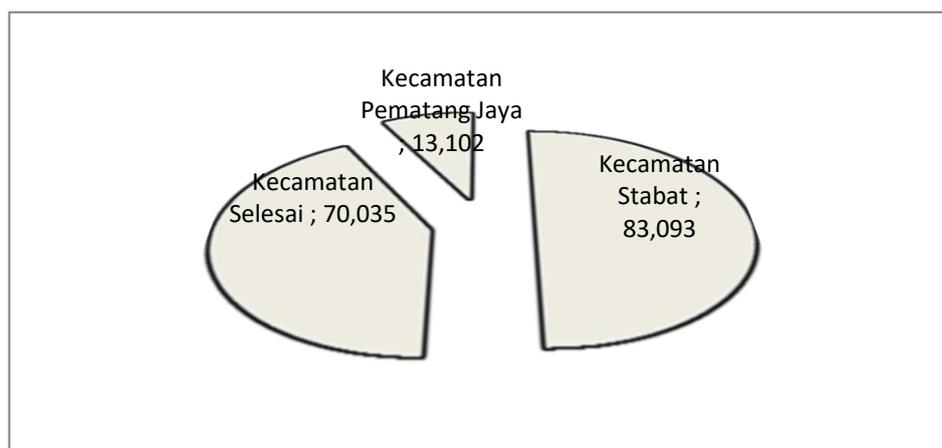
Berdasarkan data yang diperoleh dari bpslangkat.go.id bahwa jumlah penduduk Kabupaten Langkat sebanyak 1.271.454 jiwa yang terdiri dari laki-laki 651.121 jiwa dan perempuan 620.333 jiwa, seperti pada grafik berikut ini:



Sumber:bpslangkat.go.id,2019

Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat

Selanjutnya penduduk terbanyak berada di Kecamatan Stabat yaitu 83.093 jiwa, kemudian Kecamatan Selesai 70.035 jiwa, sedangkan Kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pematang Jaya dengan jumlah penduduk 13.102 jiwa, seperti grafik berikut:



Sumber:bpslangkat.go.id,2019

Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 976.535 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 154,48 jiwa per Km². Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2000 adalah sebesar 0,88 persen. Untuk tahun 2013 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Langkat 978.734 jiwa.

4. Kawasan Potensi Pada Kabupaten Langkat

a. Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas sekitar 56.141 Ha. terletak di Kecamatan Bahorok, Salopian, Kutambaru, Sei Bengai, Kuala, Batang Serangan, Sawit Seberang, Sei Lapan, Berandan Barat, Besitang, Pangkalan Susu, dan Pematang Jaya. Kawasan hutan produksi tetap memiliki luas sebesar 39.453 Ha, meliputi Kecamatan Secanggang, Tanjung Pura, Gebang, Babalan, Sei Lapan, Brandan Barat, Besitang, Pangkalan Susu dan Pematang Jaya.

b. Kawasan Pertanian

Kawasan tanaman lahan basah, berdasarkan analisis kesesuaian lahan, maka kawasan ini direncanakan berlokasi menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total \pm 49.293 Ha. Kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar diseluruh kecamatan Kabupaten Langkat baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 36.348 Ha, dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering meliputi Kecamatan Besitang, Bahorok, Hinai, Tanjung Pura, Sei Bingei, Binjai, Selesai, Wampu, dan Secanggang. Kawasan tanaman tahunan/perkebunan diarahkan meliputi seluruh kecamatan dengan luas pengembangan mencapai \pm 202.485 Ha.

c. Kawasan Peternakan

- (1) Peternakan hewan besar: arahan sentra produksi peternakan hewan besar seperti sapi potong dan kerbau meliputi Kecamatan Sei Bingei, Kuala, Selesai, Binjai, Wampu, Batang Serangan, Sawit Seberang,

Padang Tualang, Hinai, Secanggang, Pematang Jaya, Stabat, Bahorok, dan Sirapit.

- (2) Peternakan hewan kecil seperti domba dan kambing, meliputi: Kecamatan Selesai, Binjai, Hinai, Wampu, Padang Tualang, Sawit Seberang, Tanjung Pura, Sei Bingei, Kuala, dan Gebang.
- (3) Peternakan unggas seperti ayam dan itik meliputi: Kecamatan Binjai, Selesai, Kuala, Salapian, Tanjung Pura, dan Secanggang.

d. Kawasan Perikanan

- (1) Pengembangan perikanan laut dan budidaya (tambak), diarahkan di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, Sei Lapan, Gebang, Besitang, Babalan, dan Kecamatan Secanggang.
- (2) Perikanan air tawar berupa kolam potensial dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat, sedangkan perikanan air tawar berupa minapadi potensial dikembangkan di lahan sawah beririgasi di Kabupaten Langkat.
- (3) Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Langkat meliputi: perikanan tangkap di laut diarahkan pada jalur penangkapan ikan 0 – 4 mil dari garis pantai di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, Sei Lapan, Gebang, Besitang, Babalan, dan Kecamatan Secanggang, perikanan tangkap di Perairan Umum diarahkan di Kecamatan Kutambaru, Sei

Bingei, Bahorok, Salapian, Kuala, Selesai, Padang Tualang, Stabat, Wampu, Hinai dan Tanjung Pura.

- (4) Pengembangan perikanan terpadu melalui konsep minapolitan dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Susu dan didukung oleh desa-desa pesisir. Kawasan agromarinepolitan meliputi kawasan pantai timur Kabupaten Langkat. Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap meliputi: PPI Pangkalan Susu, PPI Pangkalan Brandan dan PPI Kuala Gebang. Pengembangan perumahan nelayan diarahkan di Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Babalan dan Pangkalan Susu.

e. Kawasan Pertambangan

- (1) Kawasan Pertambangan rakyat berada di Kecamatan Kutambaru, Bahorok, Salapian, Kuala, Sirapit, Selesai, Sei Bingei, Wampu, Batang Serangan, Sawit Seberang, Pangkalan Susu dan Berandan Barat.
- (2) Kawasan Pertambangan besar meliputi:
 - (a) Pertambangan Minyak dan Gas Bumi berada di Pangkalan Susu, Brandan Barat, Sei Lapan, Babalan, Hinai, Padang Tualang, Secanggih dan Binjai.
 - (b) Tambang Panas bumi.
 - (c) Tambang Batu Bara.
 - (d) Tambang Air Tanah CAT Medan.

f. Kawasan perindustrian

Kawasan industri di Kabupaten Langkat terutama industri kecil dan menengah diarahkan diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, sedangkan industri besar dapat diarahkan dan disesuaikan dengan hasil komoditi yang ada disetiap kecamatan dengan Pusat Industri (PI) berada pada Kecamatan Pangkalan Susu.

g. Kawasan Parawisata

(1) Wisata alam darat, meliputi:

Pemandian dan Rehabilitasi Orang Utan, Gua Batu Kapal dan Gua Batu Rizal, Kecamatan Bahorok, Gua, Air Terjun Marike dan Air Panas Simolap Kutambaru di Kecamatan Kutambaru Pemandian Namu Relok, Kecamatan Salopian, Pemandian Pangkal, Pemandian/Air Terjun Lau Berte, Pemandian Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingei, Sumber Air Panas Kuala Buluh, Kecamatan Padang Tualang, Batu rongreng Desa Sungai Musam dan Tangkahan di Kecamatan Batang Serangan, Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut di Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggih, dan Arung jeram Sungai Wampu dan Sungai Bingei.

(2) Wisata alam laut, meliputi:

Pulau Sembilan, Pantai Berawe di Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu, dan Pantai Kuala Serapu, Kecamatan Tanjung Pura.

(3) Wisata buatan, meliputi:

Istana Batu Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang, Pulau Kuburan Mas Merah dan Kuburan Panjang di Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu, Mesjid Azizi, Makam T. Amir Hamzah dan musium, Kecamatan Tanjung Pura, Haul Tuan Guru Besilam, Kecamatan Padang Tualang, dan Kampung Bali di Kecamatan Wampu.

5. Iklim dan Fenomena Alam Pada Kabupaten Langkat

Menurut data bpslangkat, Kabupaten Langkat memiliki Iklim Tropis Basah, dimana sepanjang tahun merupakan bulan basah (curah hujan diatas 100 mm³/bulan) tanpa ada bulan kering, sehingga bisa disebut hujan hampir merata sepanjang tahun, dengan rata-rata curah hujan tertinggi untuk tiga tahun terakhir terjadi di bulan Mei yaitu 300 mm³ dan curah hujan terendah terjadi di bulan februari yaitu 116 mm³. Berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson, wilayah Kabupaten Langkat termasuk tipe iklim A dimana musim kemarau terjadi pada bulan februari-Maret dan musim hujan pada bulan September-Februari. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1.00 sampai dengan 3.000 mm pertahun. Suhu rata-rata minimum berkisar antara 230-250 C dan rata-rata maksimum 300-330 C, serta kelembaban udara relatif antara 65%-75%.

Di Kabupaten Langkat juga terdapat fenomena alam yang disebut angin Bahorok, yaitu: angin kechang dan kering yang berhembus dari arah Samudera Hindia melewati perbukitan daerah Bahorok menuju ke arah dataran rendah bagian timur. Angin tersebut biasa terjadi di pertengahan tahun.

6. Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Langkat

Menurut rencana tata ruang wilayah pada kabupaten Langkat, kawasan dapat dikembangkan menjadi tiga wilayah strategis, yakni:

a. Kawasan strategis ekonomi, meliputi:

- (1) Kawasan ekonomi terpadu di Kecamatan Stabat.
- (2) Pelabuhan laut di Kecamatan Pangkalan Susu dan Kecamatan Tanjung Pura.
- (3) Kawasan Industri di Kecamatan Pangkalan Susu.
- (4) Kawasan wisata bahari dan lingkungan hidup di Kecamatan Pangkalan Susu.

b. Kawasan Strategis Sosial dan Budaya, meliputi:

- (1) Masjid Azizi, Makam T.Amir Hamzah dan Musium Daerah di Kecamatan Tanjung Pura.
- (2) Makam Tuan Guru Besilam di Kecamatan Padang Tualang.
- (3) Kampung Bali di Kecamatan Wampu.

c. Kawasan Strategis Lingkungan, meliputi:

- (1) Taman Nasional Gunung Leuser di Kecamatan Batang Serangan, Bahorok dan Kutambaru.
- (2) Kawasan Rawan Bencana di Kecamatan Bahorok.
- (3) Pulau Sembilan di Kecamatan Pangkalan Susu.
- (4) Suaka Marga Satwa Langkat Timur dan Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggang.

(5) Bahorok-Tangkahan.

7. Analisis SWOT Sektor Pertanian dan Perikanan Kabupaten Langkat

a. Analisis SWOT Sektor Pertanian

Analisis sektor pertanian dalam peningkatan strategi menjadi sektor basis maka perlu dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan gambaran tentang hal-hal apa saja yang menjadi kelebihan, kelemahan, peluang serta ancaman sektor pertanian bagi Kabupaten Langkat seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Analisis SWOT Sektor Pertanian

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p>KEKUATAN (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan kawasan yang luas. 2. Tata letak kabupaten Langkat strategis. 3. Lahan pertanian yang menyebar hampir diseluruh kecamatan. 	<p>KELEMAHAN (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM khususnya tenaga penyuluh pertanian. 2. Terbatasnya dana pemerintah daerah. 3. Kurangnya perhatian generasi muda dalam melakukan pengembangan sektor pertanian.
<p>PELUANG (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya permintaan yang tinggi dari wilayah sekitar langkat. 2. Adanya dukungan pemerintah pusat melalui dana pembangunan pertanian. 3. Adanya investor pada sektor pertanian Berkembangnya teknologi. 	<p>S-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perluasan lahan pertanian dengan dukungan pemerintah pusat (S1,O2). 2. Memanfaatkan tata letak yang strategis dengan melakukan ekspansi perdagangan hasil pertanian ke daerah sekitar kabupaten Langkat sehingga langkat menjadi lumbung pada bagi daerah lain (S2,O2). 3. Meningkatkan lahan pertanian dengan variates berbeda melalui dukungan investor (S3,O3, O4). 	<p>W-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi dan penambahan SDM penyuluh pertanian dengan adanya dukungan pemerintah pusat (W1,O1). 2. Peningkatan dana pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat (W2,O2). 3. Meningkatkan perhatian generasi muda terhadap sektor pertanian dengan memberikan dukungan dana bagi pengembangan teknologi (W3,O4).
<p>ANCAMAN (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya bencana alam. 2. Persaingan antara kabupaten meningkatkan peralihan investor ke daerah lain. 3. Persaingan di era globalisasi dengan menggunakan teknologi. 	<p>T-S:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan dan penggalian sumber potensi pertanian secara berkelanjutan pada kecamatan-kecamatan yang pada kabupaten Langkat sehingga lahan pertanian dapat menyebar secara merata dan jika terjadi bencana alam maka tidak berdampak secara menyeluruh (S1,T1). 2. Memanfaatkan letak yang strategis dengan menemukan varietas padi unggulan yang tidak dimiliki oleh wilayah lain (S2,T2). 3. Memanfaatkan lahan pertanian yang hampir menyebar diseluruh kecamatan dengan menselaraskan teknologi tepat guna. 	<p>W-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan SDM tenaga penyuluhan yang mampu bersaing dan menguasai teknologi (W1,T1,T2) 2. Optimalisasi dana dengan pengembangan jenis padi yang dapat dikembangkan melalui teknologi (W2,W3,T2,T3)

Sumber: Diolah Penulis, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa sumber kekuatan sektor pertanian Kabupaten Langkat adalah ketersediaan kawasan yang luas, kata letak kabupaten

Langkat strategis dan lahan pertanian yang menyebar hampir diseluruh kecamatan, selanjutnya kelemahan kabupaten Langkat adalah: keterbatasan SDM khususnya tenaga penyuluh pertanian, terbatasnya dana pemerintah daerah dan kurangnya perhatian generasi muda dalam melakukan pengembangan sektor pertanian, kemudian peluang yang ada pada Kabupaten Langkat yaitu adanya permintaan yang tinggi dari wilayah sekitar langkat, adanya dukungan pemerintah pusat melalui dana pembangunan pertanian, adanya investor pada sektor pertanian dan perkembangan teknologi sedangkan ancaman pada kabupaten Langkat adalah, terjadinya bencana alam, persaingan antara kabupaten meningkatkan peralihan investor ke daerah lain dan persaingan di era globalisasi dengan menggunakan teknologi.

b. Analisis SWOT Sektor Perikanan

Analisis sektor perikanan dalam peningkatan strategi menjadi sektor basis maka perlu dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan gambaran tentang hal-hal apa saja yang menjadi kelebihan, kelemahan, peluang serta ancaman sektor perikanan bagi Kabupaten Langkat seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Analisis SWOT Sektor Perikanan

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p>KEKUATAN (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi lahan budi daya perikanan. 2. Adanya pelaku usaha budi daya perikanan. 3. Ketersediaan benih alam. 4. Tersedianya Dana Pemerintah Daerah melalui APBD. 	<p>KELEMAHAN (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala hama dan Penyakit. 2. Minimnya pelatihan budi daya. 3. Keterbatasan penyuluh budi daya perikanan.
<p>PELUANG (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang pasar yang besar. 2. Jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. 3. Minat masyarakat untuk melakukan budi daya ikan tinggi. 	<p>S-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan lahan budi daya perikanan karena peluang pasar yang besar (S1,O2). 2. Menambah pelaku usaha budi daya jenis perikanan yang berbeda (S2,O2). 3. Menyediakan lembaga pembibitan ikan sehingga minat masyarakat semakin tinggi (S3,O3). 	<p>W-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menimalisir penyakit ikan dengan membentuk kelompok pelaku budidaya agar saling berdiskusi (W1,W2,O3). 2. Peningkatan penyuluh perikanan sukarela yang dimabil dari pelau budidaya (W3,O3).
<p>ANCAMAN (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kelembagaan permodalan. 2. Terbatasnya infrastuktur akses produksi. 	<p>T-S:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha didorong untuk membentuk kelembagaan swasta dengan bantuan modal pemerintah daerah (T1,S2). 2. Peningkatan infrastruktur akses produksi dengan perencanaan anggaran yang fokus pada infrastruktur (S4,T2). 	<p>W-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan tentang hama pada ikan melalui kelembagaan (W1,W2,T1). 2. Tingkatkan SDM tenaga penyuluhan (W3,T1).

Sumber: Diolah Penulis, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa sumber kekuatan sektor perikanan Kabupaten Langkat adalah potensi lahan budi daya perikanan, adanya pelaku usaha budi daya perikanan, ketersediaan benih alam dan tersedianya Dana Pemerintah Daerah melalui APBD, selanjutnya kelemahan sektor perikanan kabupaten Langkat yaitu kendala hama dan penyakit, minimnya pelatihan budi daya dan keterbatasan

penyuluh budi daya perikanan, kemudian peluang yang ada pada sektor perikanan Kabupaten Langkat yaitu peluang pasar yang besar, jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan minat masyarakat untuk melakukan budi daya ikan tinggi sedangkan ancaman sektor perikanan pada kabupaten Langkat adalah belum adanya kelembagaan permodalan dan terbatasnya infrastuktur akses produksi.

8. Kontribusi Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan Dalam Pendapatan asli Daerah Kabupaten Langkat

Pendapatn Asli Daerah Kabupaten Langkat dari tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Pada Tahun 2015-2017

Uraian	2016	2017
Pendapatan Pajak Daerah	42.304.284.902,54	46.948.822.153,00
Pendapatan Retribusi Daerah	18.370.307.878,00	19.471.687.021,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.745.433.350,00	7.996.061.801,00
Lain-lain PAD yang sah	56.295.333.779,25	58.256.642.437,93
Total	122.715.359.909,79	132.673.213.412,93

Sumber:www.bpslangkat.co.id,2019

Berdasarkan tabel 4.4 diatas adalah merupakan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dan dari total Sumber Pendapatan Asli Daerah ternyata menurut badan pusat statistik bahwa sektor pertanian dan perikanan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah dimana pada tahun 2016 sektor lain memberikan kontribusi sebesar 1,56, sektor transportasi sebesar 0,14, sektor konstruksi 0,49, sektor perdagangan 0,75, sektor industri 0,79 dan sektor pertanian dan perikanan 1,56 sedangkan pada tahun 2017 sektor lain memberikan kontribusi sebesar 1,34, sektor transportasi sebesar 0,16, sektor konstruksi 0,39, sektor perdagangan 0,51, sektor industri 0,48 dan sektor pertanian dan perikanan 2,17. Dari hal ini maka dapat dilihat bahwa kontribusi pertanian dan perikanan

adalah sebagai sektor unggulan atau sektor basis yang sangat penting untuk dilakukan strategi berkelanjutan untuk dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis SWOT terhadap sektor pertanian dan perikanan yang dilakukan maka Kabupaten Langkat penting melakukan strategi-strategi pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan berkelanjutan dan strategi tersebut sebagai berikut:

1. Strategi sektor pertanian

(a) Peningkatan perluasan lahan pertanian dan bibit unggul

Pemerintah daerah Kabupaten Langkat membuat arah kebijakan untuk dapat memperluas lahan pertanian dengan perencanaan yang baik dan jangka panjang kemudian melakukan penelitian lebih mendalam dalam menemukan bibit padi unggul.

(b) Melakukan Ekspansi

Kabupaten harus membentuk arah kebijakan yang dapat penetrasi ke pasar-pasar daerah lain agar hasil pertanian kabupaten langkat dapat menjadi penguasa pasar.

(c) Optimalisasi Sumber Daya Manusia

Penambahan fasilitas-fasilitas pendidikan dan balai pelatihan serta kerjasama dengan institusi pendidikan yang diarahkan untuk dapat menambah dan mengoptimalisasi kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola potensi sumber daya di Kabupaten Langkat dan meminimalisir

dampak negatif kegiatan manusia kepada sumber daya alam karena ketidak tahuan manusia, seperti: pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pengendalian atas pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan secara tidak berlebihan sehingga kesinambungan dan ketersediaannya tidak terjaga.

(d) Peningkatan investor

Melakukan promosi secara besar-besaran tentang potensi sektor pertanian dan perikanan bagi investor melalui promosi dan jalinan kerjasama bersyarat dengan perusahaan-perusahaan skala besar. Kemudian promosi juga dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan namun tetap terbatas dan sesuai perundang-undangan.

(e) Peningkatan manajemen agrobisnis

Meningkatkan keterampilan petani, pengelolaan agribisnis melalui pemberian insentif, pengembangan kawasan strategis dan komoditas unggulan, memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha kecil dan menengah untuk mengolah hasil-hasil pertanian, memfasilitasi promosi usaha komoditas pertanian, usaha kecil dan menengah serta meningkatkan kajian dan mengelola potensi pariwisata berbasis agro.

(f) Arah kebijakan yang mendukung pertanian

Kordinasi dan penyatuan visi dan misi pada arah kebijakan untuk kemajuan sektor pertanian.

2. Strategi Sektor Perikanan

(a) Pengembangan kawasan budidaya perikanan

Strategi pengembangan kawasan budidaya dan pengkajian kawasan terbaru sehingga memunculkan banyak kawasan budidaya perikanan.

(b) Peningkatan budidaya perikanan

Kabupaten Langkat dapat meningkatkan budi daya perikanan sebagai sektor unggulan perdagangan atau basis perdagangan melalui ikan air asin atau laut dan ikan air tawar karena Kabupaten Langkat berada di pesisir pantai timur, serta juga memiliki kawasan perikanan. Perikanan sebagai sektor basis perdagangan layaknya daerah lain mengutamakan hasil laut olahan sebagai sumber utama perdagangan. Olahan dengan bahan baku ikan dapat diterapkan dengan dukungan teknologi yang memadai sehingga hasil olahan dapat bertahan lama sehingga dapat di perdagangkan sampai keluar daerah Kabupaten Langkat dan bahkan dapat di ekspor ke luar negeri.

(c) Peningkatan sarana infrastruktur akses produksi

Arah kebijakan harus fagus pada infrastruktur akses produksi, baik jalan, pelabuhan maupun penampungan ikan sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mendistribusikan hasil panen ikannya.

(d) Menambah lembaga permodalan

Pemerintah Kabupaten harus mampu memberikan bantuan modal dengan kerjasama melalui bank daerah atau bank swasta.

(e) Mengembangkan jenis ikan

Pemerintah daerah Langkat memberikan terobosan melalui dinas terkait agar dapat melakukan pengembangan dan pembibitan ikan dari berbagai jenis.

(f) Peningkatan sumber daya manusia

Pemerintah daerah harus meningkatkan jumlah tenaga penyuluh perikanan baik dari sisi kuantitas dan kualitas agar mampu memberikan sosialisasi bagi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Analisa Potensi Sektor Basis Perdagangan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat maka didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Langkat membentuk strategi dalam peningkatan sektor pertanian dengan peningkatan perluasan lahan pertanian dan bibit unggul, membuat arah kebijakan untuk dapat memperluas lahan pertanian, melakukan ekspansi hasil pertanian ke daerah diluar Kabupaten Langkat, membentuk arah kebijakan yang dapat penetrasi ke pasar-pasar daerah lain agar hasil pertanian Kabupaten langkat dapat menjadi penguasa pasar, melakukan optimalisasi Sumber Daya Manusia, peningkatan investor, peningkatan manajemen agrobisnis dan membuat arah kebijakan yang jelas dalam mendukung sektor pertanian.
2. Kabupaten Langkat membentuk strategi dalam peningkatan sektor perikanan dengan pengembangan kawasan budidaya perikanan, peningkatan budidaya perikanan, peningkatan sarana infrastruktur akses produksi, menambah lembaga permodalan, dan mengembangkan bibit ikan unggulan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Langkat benar- benar membuat perencanaan arah kebijakan yang jelas dan jangka panjang sehingga sektor pertanian dan sektor perikanan dapat menjadi sektor unggulan.
2. Pemerintah daerah Kabupaten langkat dapat membuat terobosan bibit padi unggul dan jenis ikan unggulan yang minim di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol* 9 (9), 1531-1544
- Adyatama, M. Rozy. (2018). *Analisis Struktur Ekonomi dan Sektor Basis Di Kota Palu Tahun 2012-2016*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Asyary, M. Anas. (2011). *Analisis Sektor Basis dan Pengembangan Wilayah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan*. Jember: Universitas Jember.
- Badrudin, Rudi. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Darise, Nurlan. (2011). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Darman. (2016). *Analisis Sektor Unggulan Dan Penyerapan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara*: Universitas Haluoleo.
- Daulay, M. T., Elfindri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCET)*, 841-859.
- Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT KUALANAMU AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCET)* , 1-10.
- Dharma, Putra Dedy. (2016). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. USU
- Djaenuri, Aries. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Fauzyny, Wulan. (2013). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Halim, Abdul., & Kusufi, Sam. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: teori konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hananto, Fian, Dwi. (2018). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung (2012-2016)*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Tim Kajian Profil Sektor Riil : Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 32-36.
- Lestari, Andi, Ayu, Puji (2014). *Peranan Sektor Basis Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun Periode 2001-2012*. Jambi: Universitas Jambi.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhtarom, Abid. (2015). *Analisis PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode 2010-2015*. *Jurnal Ekbis*.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government*. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).
- Pratama, Andy., & Soejoto, Ady. (2017). *Pengaruh Sektor Basis dan Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasuruan*. *Jurnal Unesa*.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Rangkuti, Freddy. (2014). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.

- Sari, Apriyani, Intan. (2017). *Analisis Peranan Sektor Ekonomi Basis Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015*. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah.
- Siagian, Erlinda. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016*. Yogyakarta: UNY.
- Siahaan. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2014). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Bina Grafika
- Sunusi, Dewi. (2014). *Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010*. Berkala Efisiensi.
- Tarigan, Robinson. (2012). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Jenis Objek Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.

www.bpslangkat.go.id